

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DKI JAKARTA TAHUN 2023

Novia Ardini¹, Siti Novi Widowati², Palomita Srimania Deangelica³, Khiren Anggun⁴

Universitas Bina Sarana Informatika¹²³⁴, Jakarta, Indonesia

noviaardini157@gmail.com¹, noviwidowati76@gmail.com², sinuratsiallagan68@gmail.com³,

palomitasrimania@gmail.com⁴

Informasi Artikel

Vol: 1 No : 12 Desember 2024
Halaman: 7-16

Abstract

This study investigates how the Government Accounting Standards (SAP) are used in the preparation of the Jakarta Provincial Budget Realization Report for the year 2023. Government Regulation No. 71 of 2010 establishes the implementation of accrual-based SAP as the basis for achieving this goal. However, there are still issues with technical understanding and infrastructure availability. For this research, the author conducted a literature review and collected data on the implementation of SAP in DKI Jakarta through journals and online financial reports. The 2023 DKI Jakarta Budget Realization Report is an example of the research he conducted. The research results examine the alignment of the budget realization report preparation procedures with PSAP No.2 related to obtaining a WTP opinion. The findings indicate that DKI Jakarta has effectively implemented SAP in the preparation of the LRA, although there were delays in report submission. This research discusses periodic evaluations of SAP implementation to ensure compliance with applicable regulations and to adapt to changes in standards or regulations. It also aims to enhance employee training in government accounting to ensure consistent understanding and application of SAP.

Keywords:

SAP
LRA
PSAP No.2

Abstrak

Studi ini menyelidiki bagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan saat membuat Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menetapkan implementasi SAP berbasis akrual sebagai dasar untuk mencapai tujuan ini. Namun, masih ada masalah dengan pemahaman teknis dan ketersediaan infrastruktur. Untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian literatur dan mengumpulkan data tentang implementasi SAP di DKI Jakarta melalui jurnal dan laporan keuangan online. Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023 adalah contoh penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian melihat keselarasan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran dengan PSAP No.2 yang berkaitan dengan perolehan opini WTP. Hasilnya menunjukkan bahwa DKI Jakarta telah menerapkan SAP dengan baik dalam penyusunan LRA, meskipun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan. Penelitian ini membahas evaluasi berkala terhadap penerapan SAP untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan perubahan standar atau peraturan. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelatihan karyawan di bidang akuntansi pemerintahan untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten dari SAP.

Kata kunci : SAP, LRA, PSAP No.2

PENDAHULUAN

Dalam proses penyusunan dan pelaporan laporan keuangan pemerintah, ada beberapa elemen penting yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan tersebut berhasil dan berkualitas tinggi secara akuntabilitas dan transparan. Untuk menangani masalah ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerja sama dengan pemerintah untuk mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang akan digunakan oleh pemerintah untuk membuat laporan keuangan. Standar Akuntansi Negara, juga dikenal sebagai SAP, mencakup peraturan atau standar yang harus diikuti saat membuat SKPD. Standar Akuntansi Negara juga mencakup informasi tentang pengolahan unsur dan elemen—unsur-unsur yang termasuk dalam standar akuntansi yang digunakan (Aditya et al., 2024). Tujuan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia adalah untuk membuat tata kelola keuangan pemerintah menjadi transparan, akuntabel, dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP menetapkan bahwa

pemerintah daerah di Indonesia harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan standar ini. Proses penyajian laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh standar akuntansi pemerintahan (SAP). Misalnya, PP Nomor 71 tahun 2010 tentang basis akrual (*accrual basic*) pada laporan keuangan instansi pemerintahan masih belum sepenuhnya diterapkan.

Basis kas, sangat mudah dipahami dan dapat dilihat dari laporan yang disajikan secara jelas dari mana sumber keuangan yang ada (Rosana & Bharata, 2023). Ada sejumlah faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah; ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan akuntansi, kemampuan SDM, dan ketersediaan sistem akuntansi yang memadai. Selain itu, pengaruh eksternal dapat diatur dan dikontrol oleh perusahaan (Fu'ad & Sambharakreshna, 2024). Menciptakan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan lebih mudah dengan LKPD yang memenuhi standar. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu indikator kualitas pelaporan keuangan yang baik. Meskipun aturan akuntansi pemerintahan (SAP) telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai standar utama untuk membuat laporan keuangan, masih ada beberapa orang yang mencoba menerapkannya. Hal ini dibuktikan oleh dua bukti faktual yang menunjukkan bahwa penerapan SAP belum sepenuhnya diterapkan. Salah satunya adalah bahwa laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya menerapkan PP No. 71 tahun 2010 (Fu'ad & Sambharakreshna, 2024). Laporan tahunan menunjukkan beberapa perbedaan. Studi lain juga menemukan hal yang serupa. Misalnya, Kecamatan Langowan Barat bertindak sebagai entitas pelaporan dan menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, peraturan akuntansi pemerintahan, yang berarti mereka menyajikan neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan realisasi anggaran belanja berbasis akrual. Namun, item pembiayaan dan transfer yang belum diselesaikan sesuai PP No. 71 Tahun 2010 masih terlihat dalam laporan pelaksanaan anggaran (Mumu et al., 2023).

Problem-problem ini menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang dapat memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, termasuk Laporan Realisasi Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas, dua pilar utama pengelolaan keuangan daerah, akan terganggu oleh LRA yang tidak sesuai dengan SAP. Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan meningkatkan laporan keuangan di setiap daerah (Tanjung, 2015) Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang memiliki anggaran terbesar dan transaksi keuangan yang kompleks, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa penyusunan LRA Tahun 2023 benar-benar sesuai dengan SAP. Namun, dalam kenyataannya, evaluasi menyeluruh terhadap penerapan SAP di wilayah ini masih sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah digunakan untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi kepatuhan terhadap SAP, yaitu dengan melihat seberapa mirip Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta dengan SAP yang berlaku (PSAP No.2).

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penelitian teori tentang penerapan SAP, terutama mengenai bagaimana penerapan SAP di tingkat pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran baru tentang bagaimana standar ini digunakan dan bagaimana hal itu memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan meningkatkan kualitas LKPD, terutama untuk Laporan Realisasi Anggaran. Studi ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah daerah lain yang ingin meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka, terutama dalam hal mencapai opini WTP. Dengan kata lain, metode terbaik yang ditemukan di DKI Jakarta dapat diterapkan di tempat lain. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Studi ini dapat digunakan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk membuat kebijakan baru.

atau memperbaiki peraturan pelaporan keuangan dan penggunaan SAP yang ada untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil Penelitian:

- (1) Implementasi SAP saat menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DKI Jakarta Tahun 2023 memenuhi sebagian besar persyaratan yang tercantum dalam PSAP No. 2.
- (2) Laporan keuangan mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang pendapatan, belanja, pembiayaan, dan lebih atau kekurangan.
- (3) Sebagaimana diatur dalam PP No.71 Tahun 2010, pengakuan pendapatan dan belanja telah dilakukan dengan metode akrual.
- (4) Laporan telah dikirim lebih lama daripada waktu yang ditetapkan—tidak lebih dari enam bulan setelah tahun anggaran—tetapi ini tidak berdampak pada kualitas laporan.

METODE

Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan literatur atau studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana standar akuntansi pemerintah digunakan saat membuat Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023. Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023, yang telah diaudit, merupakan sampel dari penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau kajian pustaka dengan mengacu pada Studi ini menyelidiki kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023, yang telah diaudit, dengan PP No.71 Tahun 2010. Selanjutnya, menggambarkan kesesuaian antara praktik penyusunan LRA dengan PSAP No.2 dalam bentuk tabel dan narasi, dan akhiri dengan penarikan kesimpulan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DKI Jakarta Tahun 2023, yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dokumen ini dapat diakses melalui situs web resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen ini dipilih karena mencerminkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah bagian penting dari laporan keuangan daerah, yang berisi informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pendanaan daerah. Analisis dokumen ini penting untuk mengetahui seberapa baik SAP telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Khususnya, analisis ini menganalisis keselarasan SAP dengan PSAP No.2 dalam penyusunan LRA, yang mencakup prinsip akrual untuk pembiayaan dan ekuitas serta pengakuan berbasis kas untuk pendapatan dan belanja.

PSAP No.2 mengatur bahwa LRA sekurang-kurangnya wajib memuat pos-pos sebagai berikut :

1. Pendapatan-LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/Defisit-LRA
5. Penerimaan Pembiayaan
6. Pengeluaran Pembiayaan
7. Pembiayaan Netto
8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2023

Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan pendapatan, belanja, transfer, surplus atau kekurangan, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan SilPA/SiKPA. PSAP Nomor 2 menetapkan bahwa laporan pelaksanaan anggaran harus disampaikan setidaknya sekali setahun, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang juga menyajikan Laporan Realisasi Anggaran setiap tahun. Pos-pos dalam PSAP Nomor 2 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Merupakan seluruh penerimaan kas negara/daerah yang menyumbang kelebihan saldo anggaran pada periode akuntansi yang bersangkutan. Ini adalah hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Belanja

Merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi kelebihan saldo anggaran pada periode tahun anggaran bersangkutan yang belum diterima pengembaliannya oleh negara.

3. Transfer

Yakni penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus / Defisit-LRA

Artinya, selisih pendapatan dan pengeluaran LRA selama periode pelaporan.

5. Penerimaan Pembiayaan

Kas umum negara/lokal, termasuk hasil pinjaman, penjualan surat berharga pemerintah, privatisasi perusahaan negara/daerah, pembayaran kembali pinjaman kepada pihak ketiga, dan hasil penjualan dan pengeluaran investasi permanen lainnya. Merupakan seluruh pendapatan dari suatu rekening, Dana cadangan.

6. Pengeluaran Pembiayaan

Artinya, seluruh pengeluaran RKUN/D, termasuk pinjaman kepada pihak ketiga, iuran pemerintah, pelunasan jumlah pinjaman dalam periode anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

7. Pembiayaan Netto

Artinya, seluruh pengeluaran RKUN/D, termasuk pinjaman kepada pihak ketiga, iuran pemerintah, pembayaran kembali jumlah pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan penciptaan dana simpanan.

Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, Pendapatan dan pengeluaran keuangan dalam APBN/APBD selama periode laporan.

Tabel.1 Perbandingan Keselarasan SPAP No.2 dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan DKI Jakarta Tahun 2023

Unsur	Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) No.2 Tahun 2010	LRA DKI Jakarta Tahun 2023	Ket
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
Penyajian informasi Realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, transfer, Surplus/deficit-LRA dan Pembiayaan.	PSAP No.2 LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	Sesuai
Penyajian informasi Terkait nama Entitas, cakupan Entitas, periode Yang dicakup, Mata uang Pelaporan dan Satuan angka yang Digunakan	PSAP No.2 Dalam LRA harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman pelaporan jika dianggap perlu informasi berikut : a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya b. Cakupan entitas pelaporan c. Periode yang dicakup d. Mata uang pelaporan e. Satuan angka yang digunakan	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 mengiden tifikasi secara jelas dan mengulang disetiap halaman pelaporan informasi terkait : a. Nama entitas pelaporan atau sarana idemtifikasi lainnya b. Cakupan entitas pelaporan c. Periode yang dicakup d. Mata uang pelaporan e. Satuan angka yang digunakan	Sesuai
Periode pelaporan	PSAP No.2 LRA disajikan Sekurang-kurangnya sekali Dalam setahun	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 disajikan sekali dalam setahun	Sesuai
Ketepatan Waktu Pelaporan	PSAP No.2 Suatu entitas pelaporan menyajikan LRA Selambat-lambatnya 6 bulan Setelah berakhirnya tahun Anggaran	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 audited disajikan lebih dari 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Kurang Sesuai
Penyajian pos-pos LRA	PSAP No.2 LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : a. pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/deficit-LRA e. Penerimaan pembiayaan	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 telah mencakup pos-pos sebagai berikut : a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/deficit-LRA e. Penerimaan pembiayaan	Sesuai

Pengklasifikasian Pendapatan	PSAP No.2 Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi Pendapatan menurut jenis Pendapatan-LRA dalam LRA Dan rincian lebih lanjut jenis Pendapatan disajikan pada CALK.	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam LRA dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada CALK	Sesuai
Pengklasifikasian Belanja	PSAP No.2 Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja Menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja Menurut organisasi disajikan Dalam LRA atau di CALK. Klasifikasi belanja menurut Fungsi disajikan dalam CALK.	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut Organisasi disajikan dalam LRA atau di CALK. Klasifikasi belanja menurut Fungsi disajikan dalam CALK.	Sesuai
Penyelenggaraan Anggaran	PSAP No.2 Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan Struktur anggaran yang terdiri Dari anggaran pendapatan, Belanja, dan pembiayaan	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 akuntansi anggarannya diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan	Sesuai

AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA	Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada rek Kas Umum Negara/Daerah dan Diklasifikasikan menurut jenis Pendapatan	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 pendapatannya diakui pada saat kas diterima pada rek Kas Umum Negara/ Daerah dan diklasifikasikan Menurut jenis pendapatan	Sesuai
Pengukuran	PSAP No.2 Akuntansi Pendapatan LRA dilaksanakan Berdasarkan azas bruto, yaitu Dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat Jumlah nettonya (setelah di Kompensasikan dengan pengeluaran	LRA DKI Jakarta Tahun 2023, akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah di kompensasikan dengan Pengeluaran)	Sesuai
Penyajian dan Pengungkapan	PSAP No.2 Akuntansi pendapatan LRA disusun untuk memenuhi Kebutuhan pertanggungjawaban Sesuai dengan ketentuan dan Untuk pengendalian bagi Manajemen pemerintah pusat Dan daerah	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 akuntansi pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk pengendalian bagi manajemen Pemerintah pusat dan daerah	Sesuai

AKUNTANSI BELANJA			
Pengakuan	PSAP No.2 Belanja diakui pada Saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Khusus pengeluaran Melalui bendahara pengeluaran Pengakuannya terjadi pada Data pertanggungjawaban atas Pengeluaran tersebut disahkan Oleh unit yang mempunyai Fungsi perbendaharaan	Belanja pada LRA DKI Jakarta Tahun 2023 diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD, dan khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA	Sesuai
Pengakuan dalam Hal Badan Layanan Umum	PSAP No.2 Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan Perundangan yang mengatur Mengenai badan layanan umum	LRA DKI Jakarta Tahun 2023, dalam hal badan layanan umum, belanja di akui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang Mengatur mengenai badan Layanan umum dan kebijakan Akuntansi BLUD	Sesuai
Klasifikasi belanja	PSAP No.2 Belanja diklasifikasi Kan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan Fungsi	Klasifikasi belanja dalam LRA DKI Jakarta Tahun 2023 diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi eko- Nomi yaitu belanja Operasi, Belanja modal, sampai belanja tak Terduga	Sesuai
	PSAP No.2 Belanja operasi Antara lain meliputi belanja Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, Subsidi, hibah, bantuan social,	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 mengelompok kan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah dan Bantuan social kedalam Kelompok Belanja Operasi	Sesuai
	PSAP No.2 Belanja modal Meliputi antara lain belanja Modal untuk perolehan tanah, Gedung, dan bangunan, peralata- tan, asset tak berwujud.	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 mengelompokkan belanja peralatan dan mesin, belanja Gedung dan bangunan Dan asset tetap lainnya dalam Kelompok belanja modal.	Sesuai
Transfer	PSAP No.2 Transfer keluar Adalah pengeluaran uang dari Entitas pelaporan ke entitas Pelaporan lain seperti pengelu- Aran dana perimbangan oleh Pemerintah pusat dan dana bagi Hasil oleh pemda.	LRA DKI Jakarta Tahun 2023. Pos transfer menampilkan pengeluaran uang dari entitas pelaporan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemda lain.	Sesuai

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA			
Pencatatan Surplus/Defisit-LRA	PSAP No.2 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat Dalam pos Surplus/Defisit-LRA	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 mencatat selisih pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode dalam Pos Surplus/Defisit-LRA	Sesuai
AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Pengakuan	PSAP No.2 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima Pada RKUD	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 mengakui penerimaan pembiayaan saat Kas diterima di RKUD.	Sesuai
Pencatatan	PSAP No.2 Akuntansi penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan Tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan Pengeluaran)	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 melaksanakan akuntansi pembiayaan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya.	Sesuai
AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Pengakuan	PSAP No.2 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 mengakui pengeluaran pembiayaan pada saat kas dikeluarkan dari RKUD	Selesai
AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO			
Penyajian Pembiayaan Netto	PSAP No. 2 selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan netto	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 mencatat selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dalam pos Pembiayaan Netto	Sesuai
AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN AGGARAN (SILPA/SIKPA)			
Penyajian SiLPA/SiKPA	PSAP No.2 Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA Dan belanja, serta penerimaan Dan pengeluaran pembiayaan Selama satu periode pelaporan Dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA	LRA DKI Jakarta Tahun 2023 mencatat selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama Satu periode pelaporan Dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.	Sesuai

Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DKI Jakarta Tahun 2023, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan sesuai dengan banyak aspek yang diatur dalam PSAP No. 2. Secara keseluruhan, hampir semua komponen penting dari penyusunan laporan ini telah dipenuhi, mulai dari penyampaian informasi, klasifikasi pos laporan, hingga pengambilan pendapatan dan belanja sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Laporan DKI Jakarta sangat transparan dan terbuka, dan elemen seperti pendapatan, belanja, surplus atau deficit, dan pembiayaan disajikan dengan jelas dan mudah dipahami, mendukung akuntabilitas yang baik.

Selain itu, laporan keuangan DKI Jakarta menggunakan basis akrual yang sesuai dengan ketentuan PP No.71 Tahun 2010. Ini membuat laporan keuangan lebih akurat dan lebih representatif. Pencapaian ini sangat penting karena menunjukkan bahwa laporan keuangan DKI Jakarta sudah semakin baik dan memenuhi standar dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Namun, meskipun laporan ini mencakup sebagian besar elemen yang diatur dalam SAP, ada beberapa masalah dengan waktu pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta dikirim lebih dari enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Kualitas laporan keuangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh keterlambatan ini. Meskipun ketepatan waktu sangat penting, laporan ini tetap akuntabel dan transparan. Meskipun keterlambatan ini mungkin disebabkan oleh masalah administrasi atau teknis, DKI Jakarta telah berhasil membuat laporan yang sesuai dengan SAP. Dengan sedikit perbaikan dalam manajemen waktu dan pengumpulan data di masa depan, keterlambatan ini dapat dihindari tanpa mengurangi kualitas laporan yang sudah baik.

Secara keseluruhan, implementasi SAP dalam penyusunan LRA DKI Jakarta Tahun 2023 sangat memuaskan. Meskipun ada ruang untuk perbaikan dalam hal ketepatan waktu penyajian laporan, laporan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang transparan, akuntabel, dan relevan.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa penerapan SAP dalam penyusunan LRA DKI Jakarta Tahun 2023 berjalan dengan baik, meskipun laporan telah dikirim lebih lama daripada waktu yang ditetapkan. Laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak terpengaruh oleh hal ini. Hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan penggunaan SAP untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan menghemat waktu dengan menyusun laporan. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dan tidak melakukan wawancara dengan pihak terkait. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang komponen keterlambatan dan dampak mereka, disarankan untuk menggunakan data primer. Selain itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini harus memperluas cakupannya ke pemerintah daerah lainnya.

REFERENCES

- Aditya, Rohmadira, Muhammad Arief Priambadha, Akhmad Abimanyu, and Rafly Ardiansyah. 2024. "IMPLEMENTATION of ACCRUAL – BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS (SAP) On the QUALITY of PRESENTATION of GOVERNMENT." *Journal of Social and Economics Research* 6(1):174–94.
- Donna, Eka Meirya, Verza Ayu Lestari. 2020. "Analisis laporan pelaksanaan anggaran untuk mengevaluasi kinerja keuangan Kantor Biro Keuangan Daerah Kabupaten Oku. Saldo: Jurnal Akuntansi dan Bisnis 5(2): 135. doi: 10.32502/tusukan.v5i2.2877.
- Fu'ad, Sofiyul, and Yudhanta Sambharakreshna. 2024. "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Penerapan Pp No. 71 Tahun 2010." *Among Makarti* 17(1):17. doi: 10.52353/ama.v17i1.600.
- Isramirathul Wahyu, Siska Yulia Defitri, and Nidia Anggreni Das. 2022. "Dampak Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *Jurnal OPTIMAL Ekonomi Dan Manajemen* 2(3):222–38. doi: 10.55606/optimal.v2i3.506.
- Ningtyas, Pravitasari Eka, and Dini Widyawati. 2019. "Dampak efektivitas penerapan standar akuntansi

- negara terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada pemerintah daerah di Kabupaten Asahan)." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4(1):1–14.
- Rosana, Lina, and Risma Wira Bharata. 2023. "Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan." *Jurnalku* 3(1):23–34. doi: 10.54957/jurnalku.v3i1.366.
- Sari, Imelda, Masagus Asaari, and Ika Sefty Nurul Hidayah. 2021. "Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangsel tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper STIE AAS 408–25.
- Sawir, Muhammad. 2022. "Konsep Akuntabilitas Publik." *Publikasi Jurnal* 1–27.
- Sri Anggraini, Maharani Maharani, and Rahmad Pardosi. 2023. "Peran Teori Akuntansi Terhadap Sistem Pelaporan Keuangan Pada PT. Abdi Budi Mulia (ABM)." *Akuntansi* 3(1):20–27. doi: 10.55606/akuntansi.v3i1.1451.
- Syahara, Herni, Siti Sarah Fauziah, Tri Joko Ari Wibowo, and Saepul Anwar. 2024. "Implementasi Dan Teori Stewardship Pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur." *Jurnal Karimah Tauhid* 3(4):4716–34.
- Tanjung, Galang. 2015. "Bab I 'ي' باحض خ." *Galang Tanjung* (2504):1–9.
- Wibisono, Khairunnisa Arif Fajar, and Arif Fajar Wibisono. 2024. "Efektivitas Pemahaman Standar Akuntansi Sektor Publik Dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Otoritas Pengelola Aset Keuangan Daerah Kabupaten XYZ." *Economic Reviews Journal* 3(3):979–86. doi: 10.56709/mrj.v3i3.236.